

BAB 2

TERORISME ISLAM DAN TERORISME KULIT PUTIH DI AMERIKA SERIKAT

Amerika Serikat adalah salah satu negara yang memiliki historis yang erat dengan berbagai peristiwa terorisme. Seperti peristiwa terorisme di abad ke-19 oleh organisasi terror Ku Klux Klan yang dilatarbelakangi oleh supremasi kulit putih serta tragedi runtuhnya Gedung World Trade Center akibat pembajakan pesawat oleh organisasi terror Al-Qaeda di abad 21 yang menjadi titik tolak kebijakan *Global War and Terror* oleh Presiden Bush. Akibat aksi terorisme 9/11 tersebut, Islamophobia di Amerika Serikat meningkat drastis yang terus mempengaruhi masyarakat Muslim Amerika di banyak sektor. Bahkan tragedi ini mempengaruhi Amerika Serikat dalam membangun narasi global kontemporer terkait penyematan pelaku terror.

Untuk menjelaskan lebih lanjut terkait gambaran-gambaran di atas, bab ini terbagi ke dalam beberapa sub bab, yakni Dinamika Global dan Narasi Terorisme Muslim oleh AS; Kebijakan *Global War on Terror* dan Invasi Irak; serta Supremasi Kulit putih dan Narasi Terorisme Kulit Putih yang terdiri dari sub-sub bab Ku Klux Klan, Peristiwa Penembakan di Christchurch New Zealand, Peristiwa Penembakan Orang Kulit Hitam oleh Dylann Roof, dan peristiwa penabrakan oleh James Alex Fields Jr.

2.1 Dinamika Global dan Narasi Terorisme Muslim oleh AS

Pasca tragedi runtuhnya *World Trade Center* Islam seketika menjadi agama sorotan dunia. Sebelum peristiwa ini, Muslim merupakan komunitas dengan populasi kecil di AS, yang hidup berdampingan dengan warga AS. Semua menjadi sangat berbeda dirasakan oleh Muslim Amerika Serikat pasca kejadian tersebut. Terlebih ketika Presiden G. Bush mengumumkan *The Global War on Terrorism* pada organisasi ekstrimis Islam Al-Qaeda, masyarakat Muslim

Amerika turut merasakan getahnya. Kebencian dan ketakutan akan Muslim –atau yang disebut dengan Islamophobia-- di Amerika Serikat meningkat drastis yang mempengaruhi kehidupan Muslim di Amerika Serikat di berbagai sektor.

Gallup Center for Muslim Studies melaporkan hasil surveinya pada tahun 2010 yang menghasilkan temuan bahwa 4 dari 10 orang Amerika (43%) memiliki pandangan yang negatif terhadap Muslim. Dalam survei lainnya, dihasilkan temuan bahwa 31% warga Amerika Serikat berpandangan bahwa Islam adalah agama yang paling negatif (*Gallup Center for Muslim Studies*, 2010). Selain itu, berdasarkan laporan survey dari *Gallup Center for Muslim Studies*, mendapati bahwa 48% Muslim Amerika pernah mengalami diskriminasi ras dan agama selama satu tahun terakhir pada 2010 (*Gallup Center for Muslim Studies*, 2010).

Peningkatan diskriminasi terhadap Muslim masih terus terjadi setelah peristiwa 9/11. Dari data yang dilaporkan oleh *Council on America Islamic Relations (CAIR)*, dari tahun 2001 hingga 2002 terjadi peningkatan kekerasan dan diskriminasi terhadap Muslim Amerika sebanyak 15%. Sedangkan tahun 2005 terdapat 1.972 pengaduan mengenai diskriminasi terhadap Muslim dan meningkat pada tahun 2006 sekitar 25,1% dengan pengaduan sebanyak 2.467 kasus. Diskriminasi yang merupakan akibat Islamophobia juga terjadi pada anak-anak terutama murid sekolah dan juga di kampus. Bahkan, menurut laporan dari CAIR pada 2020 lalu, hampir 40% mahasiswa Muslim di California dilaporkan menghadapi pelecehan atau diskriminasi (*Council on America Islamic Relations*, 2020).

Bentuk-bentuk Islamophobia juga terus digaungkan oleh berbagai tokoh. Sekelompok kecil ideolog radikal yang terdiri dari Frank Gaffney dari Center for Security Policy, Aktivistis *grassroot* Islamophobia Brigitte Gabriel, dan Andrew McCarthy telah berjuang untuk

mendefinisikan Syariah sebagai “ideologi totaliter” dan “doktrin hukum-politik-militer” yang berkomitmen untuk menghancurkan peradaban Barat (Jerry et al., 2010). Bahkan, pada kontroversi tahun 2010 di seputar pusat komunitas Park51 di Manhattan, mengungkapkan bagaimana para ahli mengabadikan gagasan bahwa masjid bukan lagi rumah ibadah tetapi “kuda Troya” yang menyimpan dan menyebarkan teologi Islam radikal (CDN American Progress, 2011).

David Yerushalmi, Pendiri *Society of American for National Existence* (SANE), bahkan mengkampanyekan gerakan "*Mapping Shari'a in America: Knowing the Enemy*" (Yerushalmi, 2012: 2). Siaran pers Juni 2007 yang mengumumkan kampanye tersebut mengindikasikan bahwa *Society of American for National Existence* (SANE) akan bekerja untuk "menguji proposisi bahwa Syari'ah merupakan konspirasi kriminal untuk menggulingkan pemerintah AS" dengan menyelidiki dan memeringkat kepatuhan terhadap hukum Islam dan sekolah harian terkait di seluruh AS (Yerushalmi, 2012: 2). Pernyataan itu juga berjanji untuk "mengadvokasi kriminalisasi Syariah" jika dirasa penyelidikan yang ditargetkan ke masjid dan sekolah Islam membuktikan tindakan seperti itu diperlukan (Yerushalmi, 2012: 2). Melalui *Society of American for National Existence* (SANE) jugalah, David Yerushalmi pertama kali mengusulkan undang-undang pada tahun 2007 yang berisikan bahwa kepatuhan pada Syariah merupakan “kejahatan yang dapat dihukum 20 tahun penjara” (Yerushalmi, 2012: 2).

Gambaran Islamophobia dapat dilihat dari perspektif sebagian non-muslim yang disampaikan oleh Dalal Alshammari: 1) Islam menggambarkan budaya yang monolitik, dan tidak dapat menerima realitas yang muncul di masyarakat; 2); Agama Islam memiliki nilai-nilai budaya yang sangat berbeda dengan agama dan budaya lainnya; 3) Oleh Barat, Islam dianggap lebih rendah, memiliki perilaku barbar, kuno, dan relatif tidak rasional; 4) Agama Islam

mendukung terorisme dan kekerasan dalam masyarakat; 5) Dalam politik, Islam memakai ideologi kekerasan (Alshammari, 2013:177).

Selain itu, pandangan buruk mengenai Islam dapat juga dilihat dari ringkasan tulisan yang dibuat oleh David Horowitz editor halaman utama dan sponsor dari Jihad Watch, yaitu: 1) Muslim dunia menyatakan secara terbuka ikut serta dalam jihad atau perang melawan barat; 2) Jihad merupakan bahaya yang besar bagi bangsa dan peradaban barat; 3) Jihad menentang segala aspek kehidupan Amerika, agendanya meliputi pembongkaran terhadap nilai-nilai budaya Amerika yang dilakukan secara terarah dan sistematis. Jihad ini diharapkan mampu menerapkan syariah di Amerika; 4) besarnya ancaman tersebut disampaikan secara tidak efektif dan jujur kepada masyarakat (Jihad Watch, 2007).

Suad Joseph dan Benjamin D'harlingue menyusun beberapa komentar dari artikel-artikel yang dimuat di Wall Street Journal dari tahun 2000 hingga 2007 dalam penelitiannya (Joseph & D'Harlingue, 2012:133). Komentar tersebut sangat sentral terhadap pembahasan mengenai Islam, Muslim, dan hal yang berkaitan dengannya. Terdapat delapan tematik yang dimuat dalam tulisan tersebut, antara lain:

- 1) Konstruksi perbedaan yang tak terjembatani antara Muslim dan Barat. Di banyak komentar-komentar dalam Wall Street Journal, Muslim baik warga negara AS maupun asing, digambarkan sebagai "bukan kita". (Joseph & D'Harlingue, 2012: 136).
- 2) Perbedaan yang tidak dapat disandingkan karena Islam bertentangan dengan modernitas. (Joseph & D'Harlingue, 2012: 139);
- 3) Supremasi agama Islam memicu fanatisme dan terorisme. (Joseph & D'Harlingue, 2012: 142);

- 4) Muslim Arab merupakan sumber dari terorisme dan ekstremisme Islam. (Joseph & D'Harlingue, 2012: 143);
- 5) Jaringan terror global didanai oleh kelompok-kelompok Arab dan Muslim, yang dipimpin oleh Al-Qaeda (Joseph & D'Harlingue, 2012: 145);
- 6) Pada tanggal 24 Agustus 2005, terdapat tulisan komentar dari Bret Stephen dan Joseph Rago dengan judul "*Stars, Stripes, and Crescent*", dimana ketiga hal ini merupakan simbol yang tidak asing bagi umat Islam. Dalam tulisan tersebut mereka menggambarkan umat Muslim Eropa dengan buruk dan mengingatkan masyarakat Amerika tentang potensi Muslim yang dapat mengancam Amerika (Joseph & D'Harlingue, 2012: 151);
- 7) Islam sebanding dengan fasisme Nazi. (Joseph & D'Harlingue, 2012: 154);
- 8) Pilih: "Kami" atau "Teroris". Mereka bersuara dan mendukung langkah Presiden Bush bahwa "Anda bersama kami atau Anda bersama teroris" untuk memisahkan dukungan terhadap Amerika dan perlawanan terhadap Teroris Islam (Joseph & D'Harlingue, 2012: 158).

Lembaga nonpartisan *Public Religion Research* melakukan sebuah jajak pendapat pada tahun 2011 mengenai korelasi yang kuat antara pandangan keliru tentang Muslim dan Islam dengan menonton Fox News. Tapi hal ini dikatakan masih bersifat korelatif, belum tentu bersifat kausatif. Temuan-temuan tersebut antara lain: 1) Orang Amerika yang percaya Fox News cenderung meyakini umat Islam ingin mendirikan hukum syariah, Amerika belum cukup berupaya untuk melawan ekstrimisme, dan mereka meyakini bahwa melakukan penyelidikan terhadap ekstrimisme Muslim adalah ide yang bagus; 2) Orang-orang Republik dua kali lebih banyak daripada orang-orang Demokrat percaya bahwa masyarakat Muslim berkeinginan untuk

mendirikan syariat Islam di negaranya, yakni 31% hingga 15%. Sepertiga dari mereka ialah orang-orang Kristen Evengelis kulit putih, 20% Protestan kulit putih, dan 22% Katolik kulit putih; 3) Lebih dari tiga perempat dari mereka yang mempercayai berita dari Fox News meyakini pendapat tokoh Republik, Peter King, bahwa melakukan pengecekan dan persidangan terhadap radikalisasi Muslim adalah ide yang bagus (Ali et all., 2011: 98).

Selain itu, islamophobia pun masih memberikan pengaruh bahkan sampai Pemerintahan Donald Trump. Kebijakan di tahun pertamanya menjabat, yakni kebijakannya yang menanggukkan seluruh penerimaan pengungsi, AS juga melarang warga Irak, Suriah, Iran, Libia, Somalia, Sudan, dan Yaman untuk berkunjung ke AS selama 90 hari (BBC, 2017). Sejumlah kategori visa, seperti diplomatic dan PBB, tidak termasuk dalam penundaan ini dinilai sangat diskriminatif terhadap masyarakat Muslim.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tragedi 9/11 telah mempengaruhi citra Islam dan serta kehidupan komunitas Muslim Amerika secara khusus dan Muslim secara global dalam berbagai aspek, dari pendidikan, budaya, serta sosial-politik. Sejak tragedi ini pula, peningkatan Islamophobia dan perlakuan-perlakuan diskriminatif terhadap Muslim meningkat tajam. Bahkan dua dekade setelah tragedi ini, dampak yang diakibatkan akibat tragedi ini masih terasa, tidak hanya bagi komunitas Muslim Amerika, namun juga bagi komunitas Muslim global, kebijakan diskriminatif pelarangan tujuh negara mayoritas Muslim dilarang ke Amerika Serikat pada 2017 menjadi salah satu contohnya.

2.2 Kebijakan *Global War on Terror* dan Invasi Irak

Sejak 11 September, Presiden Bush dan Menteri Luar Negeri Colin Powell telah membangun koalisi dunia untuk perang melawan terorisme (*the war against terrorism*). Presiden Bush menyebut bahwa *The Global War on Terrorism* adalah ‘perang melawan semua orang yang

berupaya mengekspor teror, dan perang melawan pemerintah yang mendukung atau melindungi mereka.’ (US Department of State Archive, 2009). Sejak perintah ini dikeluarkan, Presiden Bush telah bertemu dengan para pemimpin dari setidaknya 51 negara berbeda untuk membantu membangun dukungan bagi perang melawan terorisme.

Terkait dengan upaya lanjutan terhadap *The Global War on Terrorism* dalam hal menekan pendanaan teroris, Presiden Bush melancarkan ‘serangan’ pertama pada tanggal 23 September dengan menandatangani *Executive Order* (Perintah Eksekutif) yang membekukan aset individu dan organisasi yang terlibat dengan terorisme yang berbasis di AS. Selain itu, 196 negara mendukung perang finansial melawan teror, 142 negara telah bertindak untuk membekukan aset teroris, di AS saja, aset 153 teroris yang diketahuidan pusat keuangan teroris telah dibekukan; dan jaringan keuangan teroris utama telah ditutup (US Departement of State Archive, 2009). Bahkan setelah serangan 9/11, *Financial Action Task Force* (FATF) bertemu dalam sesi luar biasa pada 29-30 Oktober 2001 di Washington DC untuk mempertimbangkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memerangi kegiatan pendanaan teroris. Akibatnya, FATF memperluas mandatnya untuk secara resmi memasukkan pendanaan teroris, dan mengadopsi Delapan Rekomendasi Khusus (*Eight Special Recommendations*) untuk tujuan ini (FATF, 2002).

Presiden Bush dan Menteri Pertahanan, Donald Rumsfeld memulai *Operation Enduring Freedom* pada 7 Oktober 2001 dan mendapat dukungan dari negara-negara mulai dari Inggris hingga Australia hingga Jepang (US Departement of State Archive, 2009). *Operation Enduring Freedom* adalah nama yang diberikan untuk operasi militer yang dilakukan untuk mendukung *The Global War on Terrorism* yang dicanangkan AS setelah serangan teroris 11 September 2001 (Larson & Savych, 2006: 125). Negara-negara menuntut agar Taliban yang berkuasa di Afghanistan menyerahkan Osama bin Laden dan para pengikutnya al Qaeda. Ketika Taliban

gagal mematuhi, pada 7 Oktober 2001, operasi militer dimulai di Afghanistan dengan tujuan mengalahkan pasukan Taliban dan Al Qaeda serta mengubah rezim (Larson & Savych, 2006:125).

Pada 2003, Amerika Serikat menginvasi Irak dengan dalih bahwa Irak menggunakan senjata pemusnah massal terhadap warga negaranya serta memiliki kebencian yang mendalam terhadap Amerika dan juga telah membantu, melatih, dan menyembunyikan teroris, termasuk operasi Al Qaeda (New York Times, 2003). Seperti pada pidato Presiden Bush pada 18 Maret 2003 yang berbunyi:

“This regime has already used weapons of mass destruction against Iraq's neighbors and against Iraq's people. The regime has a history of reckless aggression in the Middle East. It has a deep hatred of America and our friends. And it has aided, trained and harbored terrorists, including operatives of Al Qaeda.”

“The danger is clear. Using chemical, biological or, one day, nuclear weapons, obtained with the help of Iraq, the terrorists could fulfill their stated ambitions and kills thousands or hundreds of thousands of innocent people in our country or any other.” (New York Times, 2003).

Gershkoff & Kushner (2005:525) menyebutkan bahwa pemerintahan Bush berhasil membingkai konflik Irak tersebut sebagai perpanjangan dari ‘*global war on terror*’ yang merupakan respons terhadap serangan 11 September 2001 di World Trade Center dan Pentagon. Analisisnya terhadap pidato Bush mengungkapkan bahwa pemerintah secara konsisten menghubungkan Irak dengan 9/11. Liputan New York Times tentang pidato presiden hampir tidak menampilkan perdebatan tentang pembingkai konflik Irak sebagai bagian dari ‘*global war on terror*’. Temuan dari Gershkoff & Kushner (2005:526) menunjukkan bahwa Bush sendiri percaya bahwa Saddam Hussein dan Osama bin Laden terhubung sejak 17 September 2001. Bush mengatakan, "Saya yakin Irak terlibat," ketika ditanya tentang serangan 11 September (Woodward, 2002 dalam Gershkoff & Kushner, 2005:526). Menurut catatan Bob

Woodward tentang pertemuan *National Security Council*, sejak serangan teroris 11 September terjadi, pemerintahan Bush membingkai respons AS dalam hal perang global melawan terorisme, dengan target tidak hanya Afghanistan, tetapi juga negara-negara lain, termasuk Irak. Jadi tampaknya Bush sangat percaya pada koneksi Irak terhadap peristiwa 9/11 (Gershkoff & Kushner, 2005:526).

Dalam upaya pencegahan teroris di masa yang akan datang, AS telah memimpin jaringan global untuk mencegah tindakan teroris di masa depan. AS telah membentuk Satuan Tugas Pelacakan Teroris Asing (*Foreign Terrorist Tracking Task Force*) untuk mencegah teroris memasuki AS, menangkap dan mendakwa teroris yang dikenal, meningkatkan pembagian global informasi penegakan hukum, dan menerapkan undang-undang anti-terorisme baru yang tegas (US Department of State Archive, 2009). *The Federal Bureau of Investigation's Foreign Terrorist Tracking Task Force* (FTTTF) mendukung Cabang Keamanan Nasional FBI dalam pendeteksian, identifikasi, pelacakan, dan penilaian individu dan entitas yang menimbulkan ancaman bagi Amerika Serikat dan kepentingannya. FTTTF melakukan analisis mendalam menggunakan berbagai dataset pemerintah dan sumber publik untuk mengidentifikasi dan melacak ancaman teroris dan keamanan nasional serta memberikan intelijen tentang ancaman ini ke kantor lapangan FBI, bagian markas, dan mitra komunitas intelijen (U.S Department of Justice, 2013).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *The Global War on Terrorism* adalah salah satu bentuk perlawanan Amerika Serikat terhadap terorisme akibat tragedi 9/11. Segera setelah kejadian tersebut, AS menyeru negara-negara di seluruh dunia untuk bersama-sama memerangi terorisme. Bentuk-bentuk upaya dari *The Global War on Terrorism* ini, termasuk ke dalam banyak sektor di antaranya penekanan terhadap pendanaan teroris, operasi militer ke

Afghanistan dan Irak, serta upaya preventif seperti pembentukan *Foreign Terrorist Tracking Task Force* untuk mencegah terorisme di masa yang akan datang di AS. *The Global War on Terrorism* ini tampaknya juga mengakibatkan korban sipil berjatuhannya seperti yang terjadi di Irak dan Afghanistan. *The Global War on Terrorism* masih terus berlangsung hingga kini, karena belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah AS bahwa *the war is over*.

2.3 Supremasi Kulit putih dan Narasi Terorisme Kulit Putih

Supremasi kulit putih adalah keyakinan dan gagasan bahwa kulit putih atau ras manusia yang berkulit lebih terang, atau “putih” mengaku berada di atas kelompok ras lain. Dalam penggunaan kontemporer, istilah supremasi kulit putih telah digunakan untuk menggambarkan beberapa kelompok yang mendukung doktrin ultranasionalis, rasis, atau fasis. Kelompok supremasi kulit putih seringkali mengandalkan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka (Jenkins, 2021). Supremasi kulit putih adalah ideologi, pola nilai dan keyakinan yang tertanam di hampir setiap sistem dan institusi di AS. Merupakan keyakinan bahwa menjadi kulit putih adalah menjadi manusia dan diinvestasikan dengan hak universal yang tidak dapat dicabut dan menjadi tidak putih berarti tidak sepenuhnya menjadi manusia, yakni objek yang dapat dibuang untuk disalahgunakan oleh orang lain (Ho, 2021). Fredrickson (1981:11) menyebutkan bahwa supremasi kulit putih mengacu pada sikap, ideologi, dan kebijakan yang terkait dengan munculnya bentuk dominasi kulit putih atau Eropa yang terang-terangan atas populasi "bukan kulit putih". Dengan kata lain, hal ini melibatkan pembuatan perbedaan yang tidak menyenangkan secara sosial yang didasarkan terutama pada karakteristik fisik dan keturunan (Fredrickson, 1981:11).

Di Amerika Serikat — terutama di Selatan — di era perbudakan dan selama periode segregasi rasial oleh Jim Crow, supremasi kulit putih mendapat dukungan politik yang luas, seperti yang terjadi di rezim kolonial Eropa kontemporer. Doktrin ini terutama dikaitkan dengan kelompok-kelompok kekerasan seperti Ku Klux Klan yang mendapat keberhasilan di Amerika Serikat (terutama pada tahun 1920-an), meskipun banyak individu dan kelompok non-kekerasan juga sangat percaya pada gagasan supremasi kulit putih. Namun, pada pertengahan 1950-an, doktrin rasis yang terang-terangan menjadi sangat tidak disukai di sebagian besar dunia Barat, suatu perkembangan yang dipercepat oleh desegregasi dan dekolonisasi (Jenkins, 2021).

McGettigan & Smith, (2016:13) menyebut bahwa demokrasi di Amerika Serikat selalu menjadi benteng supremasi kulit putih. Di mana orang kulit berwarna disebutkan dalam Konstitusi AS, mereka dipilih untuk diremehkan. Akibat permusuhan beberapa orang kulit putih Amerika terhadap gerakan hak-hak sipil Amerika, undang-undang hak-hak sipil, terutama Undang-Undang Hak Sipil (1964) dan Undang-Undang Hak Suara (1965), dan keputusan Mahkamah Agung yang membatalkan banyak undang-undang yang diskriminatif secara rasial, terutama *Brown. v. Dewan Pendidikan Topeka* (1954), supremasi kulit putih mengalami kebangkitan kembali di Amerika Serikat pada akhir 1950-an dan 1960-an. "Kekuatan Kulit Putih" pada akhirnya memanifestasikan dirinya sebagai gerakan yang muncul akibat reaksi terhadap doktrin "Kekuatan Kulit Hitam" tahun 1960-an dan 70-an. Penganut supremasi kulit putih, serta banyak kaum konservatif sosial, terganggu oleh pengadopsian atau persetujuan pemerintah AS dalam tindakan seperti tindakan afirmatif, bus sekolah, dan aturan yang melarang diskriminasi rasial di pasar perumahan. Kebencian mereka berkontribusi pada pertumbuhan berbagai kelompok dan gerakan yang secara aktif memberitakan supremasi kulit putih, termasuk Ku Klux Klan, berbagai organisasi neo-Nazi, dan kelompok Identitas Kristen yang religius.

Daniels (2009:3) menyebutkan bahwa saat ini supremasi kulit putih telah memasuki era digital. Supremasi kulit putih telah menyesuaikan teknologi Internet dengan cara yang inovatif, canggih, dan licik. Internet adalah front yang semakin penting dalam perjuangan politik untuk memperebutkan makna ras, rasisme, dan hak-hak sipil (Daniels, 2009:3). Munculnya situs web terselubung menggambarkan fitur utama propaganda dan rasisme dunia maya di era digital: penggunaan kepengarangan yang sulit dideteksi dan agenda tersembunyi yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan politik, termasuk supremasi kulit putih (Daniels, 2009:3). Namun, terlepas dari kesulitan mengumpulkan statistik yang dapat diandalkan, sebagian besar ahli setuju bahwa prevalensi situs supremasi kulit putih online dengan jangkauan global telah meningkat dan sebagian besar berbasis di Amerika Serikat (Daniels, 2009:6).

Supremasi kulit putih menjadi salah satu pendorong banyaknya tindakan-tindakan terorisme. Berikut penjelasan mengenai tindakan-tindakan terorisme yang berlandaskan supremasi kulit putih.

2.3.1. Ku Klux Klan

Ku Klux Klan adalah organisasi teroris domestik yang didirikan tak lama setelah Perang Saudara Amerika Serikat yang berlangsung hingga tahun 1870-an. Ku Klux Klan telah menggunakan intimidasi, kekerasan, dan pembunuhan untuk mempertahankan supremasi kulit putih di pemerintahan Selatan dan kehidupan sosial (NationalGeographic, 2020). Klan menggunakan pembunuhan sebagai alat untuk menegakkan keyakinannya pada supremasi kulit putih (Lantzer, 2012 : 28). Monumen Hak Sipil di Montgomery, Alabama, dibangun sebagai pengingat pengorbanan empat puluh orang dibunuh karena membela hak asasi manusia. Pembunuhan Klan lainnya selama tahun 1960-an di antara para korban adalah: Letkol. Lemuel Penn, seorang pendidik kulit hitam yang ditembak ketika dia kembali ke rumahnya di

Washington setelah tugas militer musim panas di kaki Benning, Georgia; putaran. James reeb, yang dipukuli selama hak suara warga Afrika-Amerika menghadapi hambatan warna di seluruh Selatan, protes di Selma, Alabama; dan Viola Liuzzo, seorang pekerja hak sipil yang ditembak pada tahun 1965 saat mengemudi antara Montgomery dan Selma (Lantzer, 2012 : 28). Selain pembunuhan, Klan juga melakukan pemboman, penyiksaan, pemerkosaan, dan tindak keji lainnya. Anggota Klan menemukan dinamit sebagai senjata teror dan kehancuran. Penggunaan bom oleh anggota Klan dimulai pada Januari 1956, ketika rumah Dr. Martin Luther King Jr. di Montgomery diledakkan (Lantzer, 2012 : 26). Antara insiden itu dan 1 Juni 1963, sekitar 138 pemboman dilaporkan, dan Klan diyakini bertanggung jawab atas banyak di antaranya (Lantzer, 2012 : 26). Secara keseluruhan, kampanye teror Klan melawan Gerakan hak-hak sipil mengakibatkan hampir 70 pemboman di Georgia dan Alabama, pembakaran 30 gereja kulit hitam di Mississippi, dan 10 pembunuhan rasial di Alabama saja (Lantzer, 2012 : 26).

2.3.2. Peristiwa Penembakan di Christchurch, New Zealand

Peristiwa penembakan brutal di dua masjid di Selandia Baru pada Jumat, 15 Maret 2019 telah menewaskan 51 orang dan lebih dari 40 orang lainnya luka-luka yang kesemuanya merupakan Muslim. Pelaku dari penembakan brutal tersebut ialah Brenton Tarrant seorang kulit putih berkebangsaan Australia. Dalam sidang vonis, Hakim Cameron Mander mengatakan dirinya tidak ragu bahwa Tarrant sengaja pindah dari Australia ke Selandia Baru demi menyerang komunitas Muslim (BBC, 2020). Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengutuk "pembantaian mengerikan" di dua masjid di Selandia Baru dalam akun twitternya pada 15 Maret 2019:

“My warmest sympathy and best wishes goes out to the people of New Zealand after the horrible massacre in the Mosques. 49 innocent people have so senselessly died, with so many more seriously injured. The U.S. stands by New Zealand for anything we can do. God bless all!”

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump)

Dalam pernyataannya, Presiden Donald Trump mengungkapkan simpatinya terhadap seluruh korban dalam penembakan di Christchurch tersebut. Namun dalam pernyataan tersebut, dengan melihat fakta yang ada terkait dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh Brenton Tarrant, Presiden Donald Trump sama sekali tidak menyinggung aksi terorisme sebagai bentuk dari kejahatan tersebut.

Dilansir dari BBC (2019), Brenton Tarrant merupakan seorang penganut ideologi supremasi kulit putih. Salah satu tujuan strategis Tarrant yang digariskan dalam manifestonya, adalah “untuk menghasut kekerasan, pembalasan, dan perpecahan lebih lanjut antara orang-orang Eropa dan penjajah yang saat ini menduduki tanah Eropa (Graham, 2019:21). Mengingat sifat anti-Muslim dari terorisme Tarrant, manifestonya tidak banyak berbicara tentang Islam daripada yang diperkirakan. Meski mengakui serangannya memiliki motivasi anti-Islam, Tarrant juga menyoroti dimensi rasis, xenofobia, dan anti-imigrasinya (Graham, 2019:21). Sementara Tarrant menyesuaikan ‘bahasa gerakan Identitarian’ untuk mengekspresikan kemarahannya pada perubahan budaya dan demografis, ia juga terombang-ambing antara rasisme budaya ini dan varian supremasi kulit putih yang lebih terbuka (Graham, 2019:21). Hal ini terlihat dari referensinya terhadap slogan “14 kata” supremasi kulit putih David Lane, yang sebelumnya merupakan tokoh terkemuka di The Order, sebuah kelompok teroris supremasi kulit putih, baik dalam manifestonya maupun pada senjata apinya (Graham, 2019:21).

2.3.3. Peristiwa Penembakan Orang Kulit Hitam oleh Dylann Roof

Dylan Roof, seorang pria berusia 20 tahun yang merupakan penganut supremasi kulit putih melakukan penembakan brutal di sebuah gereja di South Carolina yang telah menewaskan sembilan orang kulit hitam pada 17 Juni 2015 lalu (Reuters, 2020). Sebagai penganut supremasi

kulit putih, hal tersebutlah yang mendorong Dylan Roof untuk melakukan kejahatan penembakan tersebut terhadap orang kulit hitam.

Gambar 1.1

Penembakan oleh Dylann Roof



Sumber: ABC11 News

Dilansir dari Reuters, seorang Hakim menyatakan Roof bersalah atas 33 dakwaan federal, termasuk kejahatan kebencian yang mengakibatkan kematian atas penembakan massal di Emanuel African Methodist Episcopal Church di Charleston pada Juni 2015. Roof mengaku menargetkan kelompok pendalaman Alkitab di Gereja Emanuel AME di Charleston pada 17 Juni 2015, karena mereka akan menimbulkan sedikit bahaya baginya (Reuters, 2020). Asisten Jaksa AS, Nathan Williams menyebutkan bahwa ‘pembunuh itu penuh kebencian dan ketidaktahuan rasial yang luar biasa’ (New York Daily News, 2016). Bahkan, Roof berharap 77 peluru yang dia tembakkan akan menjadi pembuka dalam perang ras yang mengarah pada kembalinya segregasi (New York Daily News, 2016). Merespon hal ini, Presiden Obama menyatakan dalam pidatonya bahwa ‘kita dibutakan oleh bagaimana ketidakadilan di masa lalu terus membentuk masa kini’:

"For too long, we've been blind to the way past injustices continue to shape the present."

--Presiden Barack Obama (New York Daily News, 2016).

Pernyataan Presiden Barack Obama di atas yang berbunyi "*Sudah terlalu lama, kita dibutakan dengan ketidakadilan di masa lalu yang terus membentuk masa kini.*", mengindikasikan terkait dengan fenomena *white supremacy* yang terus berlanjut dan mengakar kuat di masyarakat Amerika Serikat dan termanifestasikan dalam bentuk kejahatan yang dilakukan oleh Dylan Roof. Namun, dalam aksi kejahatan penembakan yang dilakukan oleh Dylan roof, sang penganut supremasi kulit putih ini, kepada orang-orang kulit hitam, Presiden Barack Obama sama sekali tidak menyinggung aksi terorisme sebagai bentuk dari kejahatan tersebut.

2.3.4. Peristiwa Penabrakan oleh James Alex Fields Jr

James Alex Fields Jr., berusia 22 tahun yang merupakan seorang penganut supremasi kulit putih, menabrakkan mobilnya ke pengunjung rasa di Virginia pada 12 Agustus 2017 (BBC, 2018). Target dari tabrakan itu adalah ratusan massa aksi anti-rasis dan anti-fasis di Kota Charlottesville, Virginia, dan menyebabkan 3 orang tewas dan 35 orang luka-luka atas kerusuhan antara nasionalis kulit putih dan kontra-pemrotes tersebut (Whio, 2017). Sebagai penganut supremasi kulit putih, hal tersebutlah yang mendorong James Alex Fields Jr., melakukan aksi kejahatannya.

Gambar 1.2

Penabrakan Aksi Massa oleh James Alex Fields Jr



Sumber: Dailymail.co.uk

Dilansir dari BBC, motif dari penabrakan tersebut adalah kemarahan dan kebencian kepada para anti-rasis tersebut. Jaksa federal mengatakan James berpikir untuk menyakiti orang lain saat mengemudi ke unjuk rasa di Charlottesville (BBC,2019). Bahkan setelah itu Jaksa mengungkapkan Fields tetap tidak menyesal atas tindakannya. Lebih lanjut, disebutkan bahwa ada bukti di profil media sosialnya tentang James "mengekspresikan dukungan terhadap kebijakan sosial dan rasial Adolf Hitler dan Jerman era Nazi, termasuk Holocaust" (BBC, 2019). Presiden Trump mengutuk keras aksi ini : “Kami mengutuk sekeras-kerasnya aksi kebencian, intoleransi dan kekerasan yang menjijikkan dari berbagai pihak,” ujar Presiden Donald Trump (VOA Indonesia, 2017). Dalam siaran pers yang disiarkan secara nasional, Presiden Donald Trump mengungkapkan pernyataan bahwa masih banyak di antara dua sisi (para penganut supremasi kulit putih dan kontra supremasi kulit putih) yang merupakan orang yang sangat baik, seperti dilansir oleh Newsone:

“You also had people that were very fine people on both sides.”

--Presiden Donald Trump (Newsone, 2018)

Pernyataan Presiden Donald Trump di atas, atas tindak kejahatan yang dilakukan oleh James Alex Fields Jr., sang penganut supremasi kulit putih, justru tidak berkaitan dan berupaya menormalkan dan membenarkan hal tersebut. Responnya berbunyi “*Kamu juga mengetahui orang-orang yang sangat baik di kedua sisi.*” Yang dimaksud “kedua sisi” adalah sang penganut supremasi kulit putih dan non penganut supremasi kulit putih. Dari pernyataan tersebut, terlihat tidak adanya keterkaitan antara James Alex Fields Jr. dengan kejahatan yang dilakukannya maupun korban kejahatan tersebut. Presiden Donald Trump tidak berupaya memusatkan kejahatan tersebut sebagai aksi yang dilakukan oleh James Alex Fields Jr. yang merupakan penganut supremasi kulit putih. Pernyataan Presiden Trump terkait insiden penabrakan mobil tersebut, menimbulkan kecaman karena tidak memusatkan kecaman terhadap kelompok supremasi kulit putih yang berkumpul di Charlottesville, dan karena tampaknya ia mengemukakan bahwa demonstran tandingan sama-sama bertanggungjawab atas insiden tersebut (VOAIndonesia, 2017). Dalam aksi ini pun, Presiden Donald Trump sama sekali tidak menyinggung aksi terorisme sebagai bentuk dari kejahatan tersebut.

Kaitannya dengan tindak terorisme, dalam *US Government Accountability Office* yang dipublikasikan pada April 2017, tercatat ada 85 kasus teror di AS yang berujung 225 kematian sepanjang periode 12 September 2001 (pasca tragedi 9/11) hingga 31 Desember 2016. Berdasarkan tinjauan penulis, dari 85 kasus, 62 kasus (73%) di antaranya rupanya dilakukan oleh ekstremis sayap kanan atau penganut supremasi kulit putih, sementara sisanya yang 23 (27%) dilakukan oleh para ekstremis muslim (US Government Accountability Office, 2017: 29-34). Temuan versi *Investigative Fund* yang dicatat Huffington Post menyatakan hasil yang serupa. Dari total 201 kasus teror di AS sepanjang 2008-2016, berdasarkan tinjauan Penulis, ada 115 kasus di antaranya, atau yang terbanyak, didalangi oleh ekstremis kulit putih. Ekstremis

Islam berada di tempat kedua dengan catatan 63 kasus, sementara 19 kasus dilakoni oleh ekstremis sayap kiri, sementara sisanya dari kalangan faksi lain atau tak terafiliasi dengan faksi tertentu (Huffington Post, 2017).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan terorisme yang dilakukan oleh ekstremis kulit putih, pada dasarnya berjumlah besar di Amerika Serikat. Bahkan data menunjukkan kasus terorisme oleh ekstremis kulit putih, jumlahnya yang paling tinggi di AS. Namun berkaitan dengan aksi terror oleh ekstremis kulit putih ini, respon pemerintah AS terbilang sangat kecil untuk menyebut tindakan-tindakan tersebut merupakan bagian dari aksi terorisme.

2.4 Kesimpulan

Amerika Serikat adalah salah satu negara yang memiliki historis yang erat dengan berbagai peristiwa terorisme. Seperti peristiwa terorisme di abad ke-19 oleh organisasi terror Ku Klux Klan yang dilatarbelakangi oleh supremasi kulit putih serta tragedi runtuhnya Gedung World Trade Center akibat pembajakan pesawat oleh organisasi terror Al-Qaeda di abad 21 yang menjadi titik tolak kebijakan *Global War and Terror* oleh Presiden Bush. Akibat aksi terorisme 9/11 tersebut, Islamophobia di Amerika Serikat meningkat drastis yang terus mempengaruhi masyarakat Muslim Amerika di banyak sektor. Bahkan tragedi ini mempengaruhi Amerika Serikat dalam membangun narasi global kontemporer terkait penyematan pelaku terror. Berdasarkan pemaparan di atas, aksi terorisme di AS cukup dinamis dan dilakukan oleh aktor yang beragam yang di antaranya oleh ekstremis kulit putih maupun ektrimis Muslim.

Meskipun data mengungkapkan bahwa aksi terorisme yang terjadi di Amerika Serikat justru lebih banyak dilakukan oleh ekstremis kulit putih, namun justru narasi yang berkembang secara global saat ini menggambarkan bahwa para teroris di Amerika maupun secara global tidak

lain merupakan seorang Muslim atau warga Arab. Untuk menganalisis lebih lanjut mengapa hal demikian bisa terjadi akan dijelaskan di bab berikutnya.